KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas Berkah dan Hidayah-Nya maka laporan Hasil Survei Kepuasan Implementasi Kurikulum oleh Pengguna Jasa di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala. Laporan ini merupakan penjabaran dari hasil survei kepuasan imlementasi kurikulum oleh pengguna jasa. Hal ini dilaksanakan agar pengisian monitoring dan evaluasi pada setiap mata kuliah kurikulum akan dilakukan secara maksimal.

Pada kesempatan ini tim TPMA Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terkait yang telah membantu untuk membuat kelengkapan dokumen ini. Sehingga proses evaluasi dan monitoring dapat terlaksanakan dengan baik.

Semoga hasil pada laporan ini dapat menjadi bentuk peningkatan mutu bagi prodi Ilmu Pemerintahan. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyusunan laporan ini.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

LEMBAR PENGESAHAN

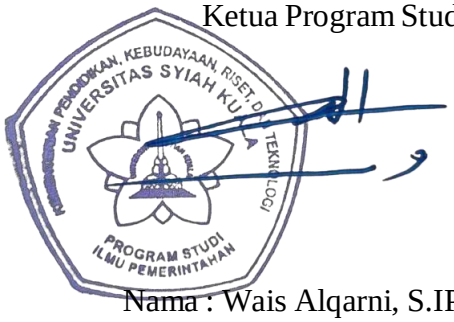
Dokumen Kegiatan Survei Kepuasan Implementasi Kurikulum Oleh Pengguna Jasa Di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

Tahun : 2024

Darussalam, 25 September 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi



Nama : Wais Alqarni, S.IP., M.A.

NIP : 199204262019031019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

LEMBAR PENGESAHAN 3

DAFTAR ISI 4

1. Pendahuluan 5
2. Tujuan Survey Kepuasan Kurikulum 6
3. Metode Pengolahan Data 6
4. Hasil Laporan Survei Kepuasaan Implementasi Kurikulum oleh Pengguna Jasa 7
5. Rencana Tindak Lanjut 15
6. Kesimpulan dan Saran 15

1. Pendahuluan

Pelaksanaan survei kepuasan implementasi kurikulum menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan saat ini, di mana tuntutan terhadap kualitas pendidikan semakin tinggi. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna jasa pendidikan, seperti siswa, orang tua, dan guru, guna menilai efektivitas kurikulum yang diterapkan. Dengan memahami pandangan dan pengalaman pengguna, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

Kebijakan pendidikan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menekankan pentingnya evaluasi dan akuntabilitas dalam pendidikan. Hal ini memberikan landasan bagi lembaga pendidikan untuk secara aktif melakukan penilaian terhadap kurikulum yang diterapkan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menegaskan perlunya standar nasional pendidikan yang mencakup pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan juga menjadi dasar hukum yang mendasari pelaksanaan survei ini. Peraturan ini menggarisbawahi kewajiban setiap satuan pendidikan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna jasa, sebagai bagian dari proses evaluasi yang komprehensif. Dengan adanya kerangka kebijakan ini, survei kepuasan diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kurikulum.

Akhirnya, hasil dari survei kepuasan ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dalam praktik pendidikan. Dengan melibatkan pengguna jasa dalam proses evaluasi, lembaga pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dan efektif dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan.

2. Tujuan Survey Kepuasan Kurikulum

Kegiatan survei kepuasan implementasi kurikulum oleh pengguna jasa memiliki tujuan untuk :

1. Menilai Efektivitas Kurikulum: Mengidentifikasi seberapa baik kurikulum yang diterapkan memenuhi tujuan pembelajaran.
2. Mengumpulkan Umpan Balik: Mendapatkan masukan dari siswa, orang tua, dan guru mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan.
3. Mendorong Peningkatan Berkelanjutan: Menggunakan hasil survei sebagai dasar untuk perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran.

3. Metode Pengolahan Data

Pengambilan data dilakukan terhadap seluruh mahasiswa aktif semester Ganjil 2023/2024. Pengolahan data dilakukan dengan membuat grafik hasil survey agar hasilnya dapat diinteprestasikan sebagai informasi tegas dan jelas mengenai data tersebutmdan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun beberapa pertanyaan mengenai Survey evaluasi pemebelajaran adalah sebagai berikut :

Q1 : Mata kuliah yang tertera pada kurikulum relevan dengan program studi Ilmu Pemerintahan

Q2 : Mata kuliah yang tertera pada kurikukum dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan studi Ilmu Pemerintahan

Q3 : Mata kuliah yang tertera pada kurikulum dapat meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu sosial dan tanggung jawab terkait permasalahan public

Q4 : Mata kuliah yang tertera pada kurikulum dapat meningkatkan keterampilan analisis dan kritis mahasiswa

Q5 : Mata Kuliah yang tertera pada kurikulum dapat mendukung pengembangan keterampilan mahsiswa dalam bidang studi Ilmu Pemerintahan seperti dalam kepemimpinan dan pelayanan public

Q6 : Mata kuliah yang tertera pada kurikulum mengacu pada pembelajaran terkait permasalahan dan studi kasus yang ada pada pemerintahan

Q7 : Mata kuliah yang tertera pada kurikulum sesuai dengan keilmuan program studi Ilmu Pemerintahan

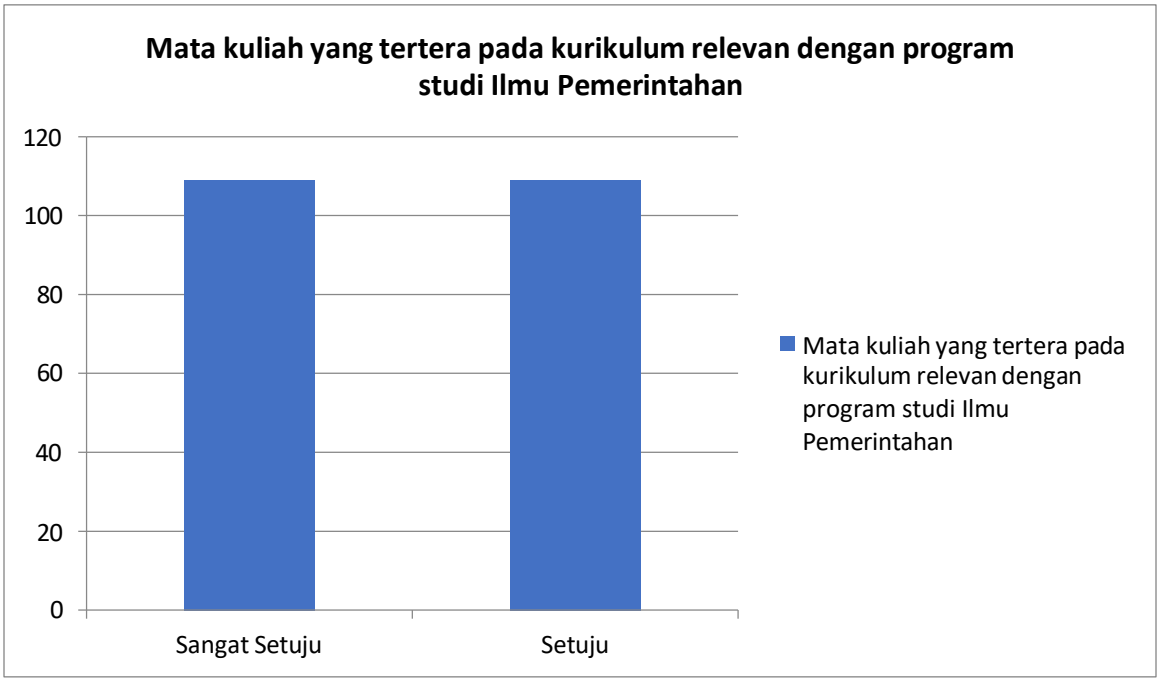
Q8 : Bahan ajar mata kuliah yang tertera pada kurikulum mudah diakses oleh pengguna kurikulum

Q9 : Saran dan kritikan kepada kurikulum merdeka belajar Gnajil 2021 – Genap 2024

4. Hasil Laporan Survei Kepuasaan Implementasi Kurikulum oleh Pengguna Jasa

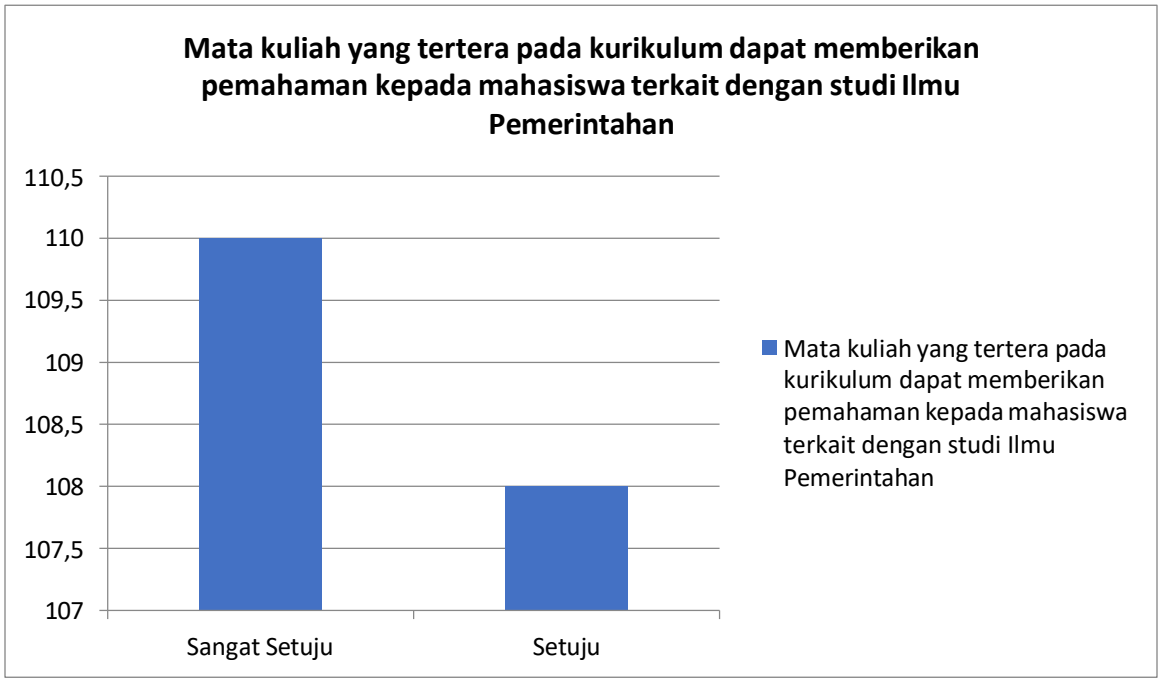
Survey ini di isi oleh 218 Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dari angkatan 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, 9 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan 1 Tendik dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan total pengisi survey sebanyak 2019. Hasil Survei kepuasan implementasi kurikulum oleh pengguna jasa dapat di lihat di bawah ini dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Mata kuliah yang tertera pada kurikulum relevan dengan program studi Ilmu Pemerintahan



Hasil survei mengenai relevansi mata kuliah dalam kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan menunjukkan respons yang sangat positif dari para responden. Dari 218 responden, sebanyak 109 orang menyatakan "sangat setuju" dan 109 orang lainnya "setuju" bahwa mata kuliah yang tertera dalam kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan studi mereka. Angka ini mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dan menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan mampu memberikan landasan yang kokoh bagi mahasiswa untuk memahami dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang pemerintahan.

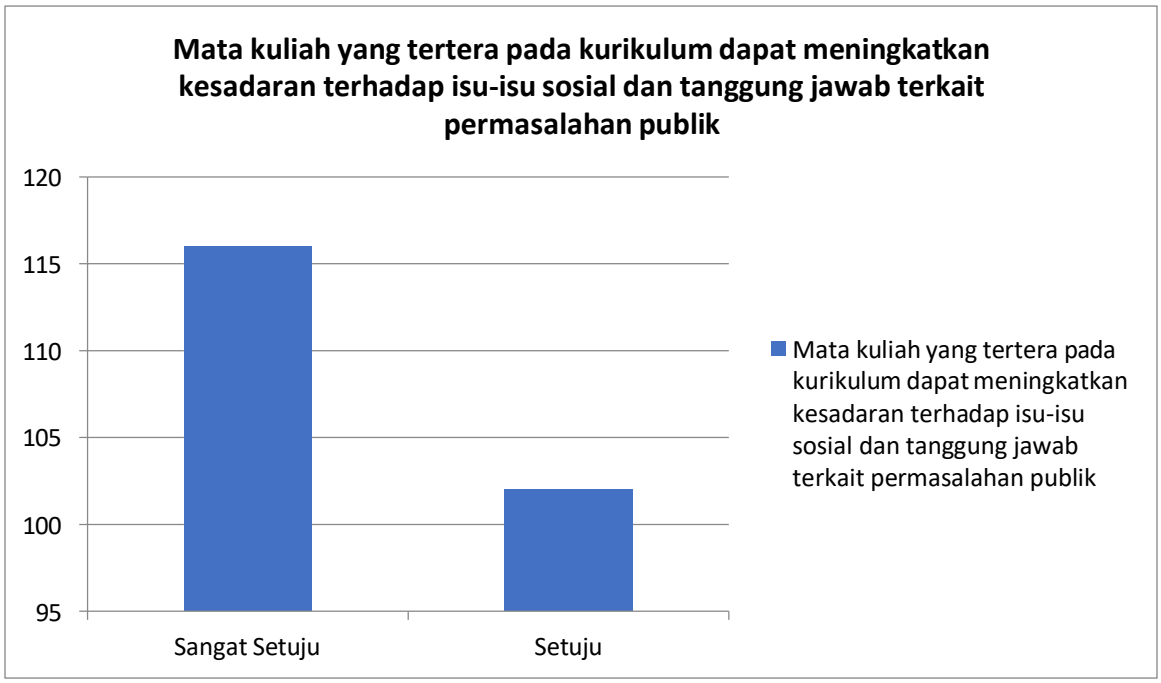
2. Mata kuliah yang tertera pada kurikulum dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan studi Ilmu Pemerintahan



Hasil survei mengenai pemahaman yang diperoleh mahasiswa dari mata kuliah dalam kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan menunjukkan respon yang sangat positif. Dari total 218 responden, sebanyak 110 orang menyatakan "sangat setuju" dan 108 orang "setuju" bahwa mata kuliah yang diajarkan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep dan isu-isu penting dalam ilmu pemerintahan. Angka ini mencerminkan bahwa kurikulum dirancang dengan baik,

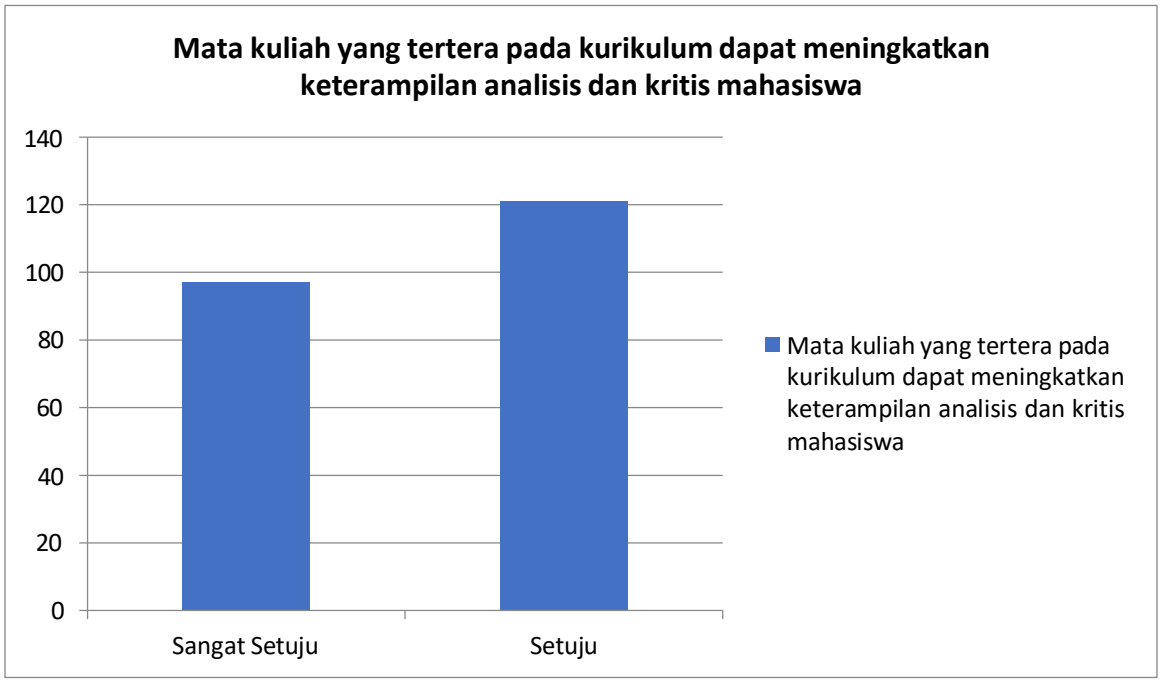
sehingga mampu menjawab kebutuhan akademis mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di bidang pemerintahan.

3. Mata kuliah yang tertera pada kurikulum dapat meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu sosial dan tanggung jawab terkait permasalahan publik



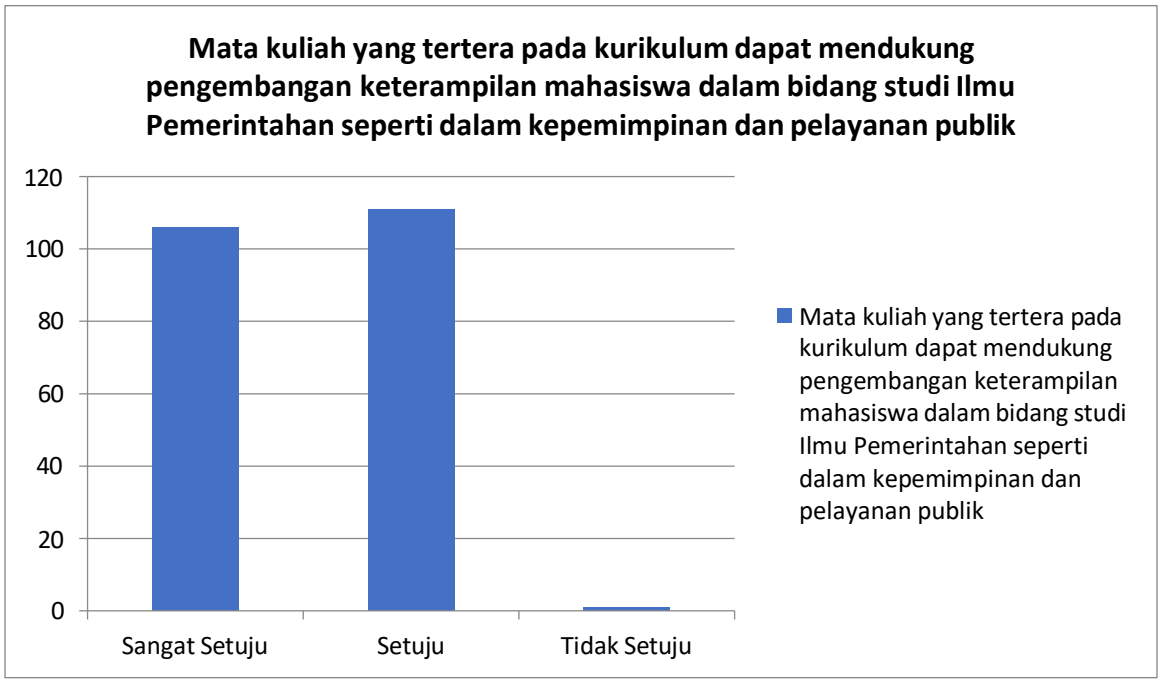
Hasil survei mengenai kemampuan mata kuliah dalam kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu sosial dan tanggung jawab terkait permasalahan publik menunjukkan respons yang sangat positif. Dari total 218 responden, 116 orang menyatakan "sangat setuju" dan 102 orang "setuju" bahwa mata kuliah yang diajarkan berkontribusi signifikan dalam membangun pemahaman mereka tentang isu-isu sosial yang kompleks. Tingkat persetujuan yang tinggi ini mencerminkan bahwa kurikulum tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan responsif terhadap tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini.

4. Mata kuliah yang tertera pada kurikulum dapat meningkatkan keterampilan analisis dan kritis mahasiswa



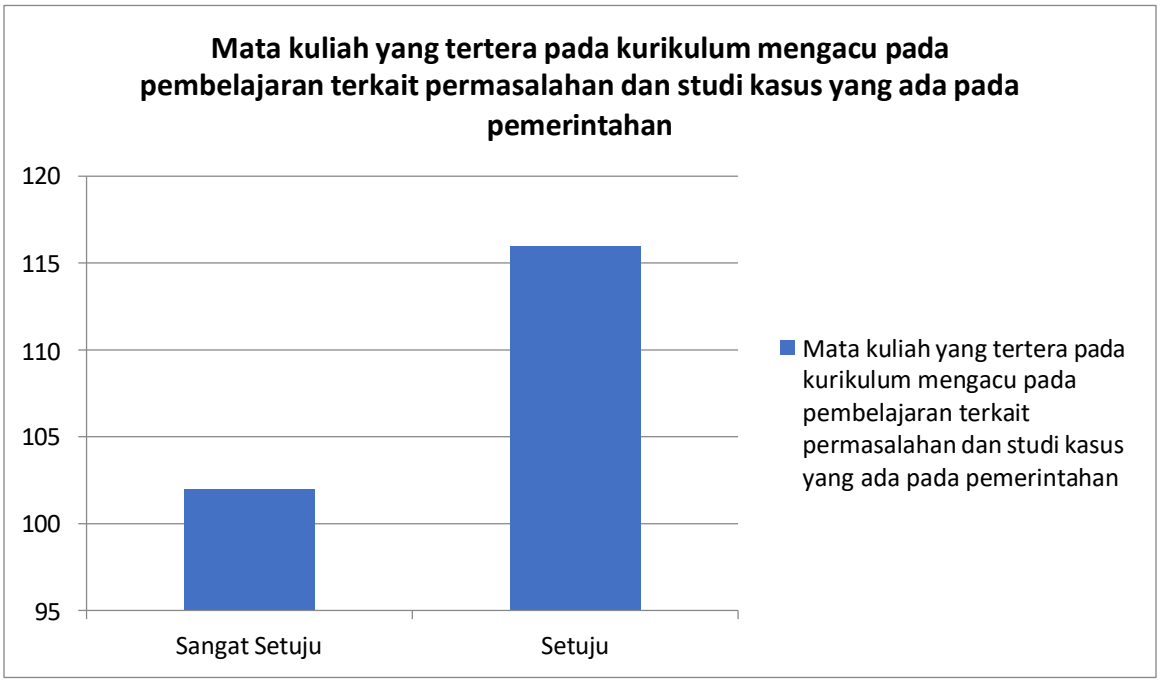
Hasil survei mengenai sejauh mana mata kuliah dalam kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan dapat meningkatkan keterampilan analisis dan kritis mahasiswa menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari total 218 responden, 97 orang menyatakan "sangat setuju" dan 121 orang "setuju" bahwa mata kuliah yang diajarkan efektif dalam mengasah kemampuan mereka untuk berpikir analitis dan kritis. Persentase yang tinggi ini mengindikasikan bahwa kurikulum dirancang dengan baik untuk mendorong mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan isu yang kompleks di bidang pemerintahan.

5. Mata kuliah yang tertera pada kurikulum dapat mendukung pengembangan keterampilan mahasiswa dalam bidang studi Ilmu Pemerintahan seperti dalam kepemimpinan dan pelayanan publik



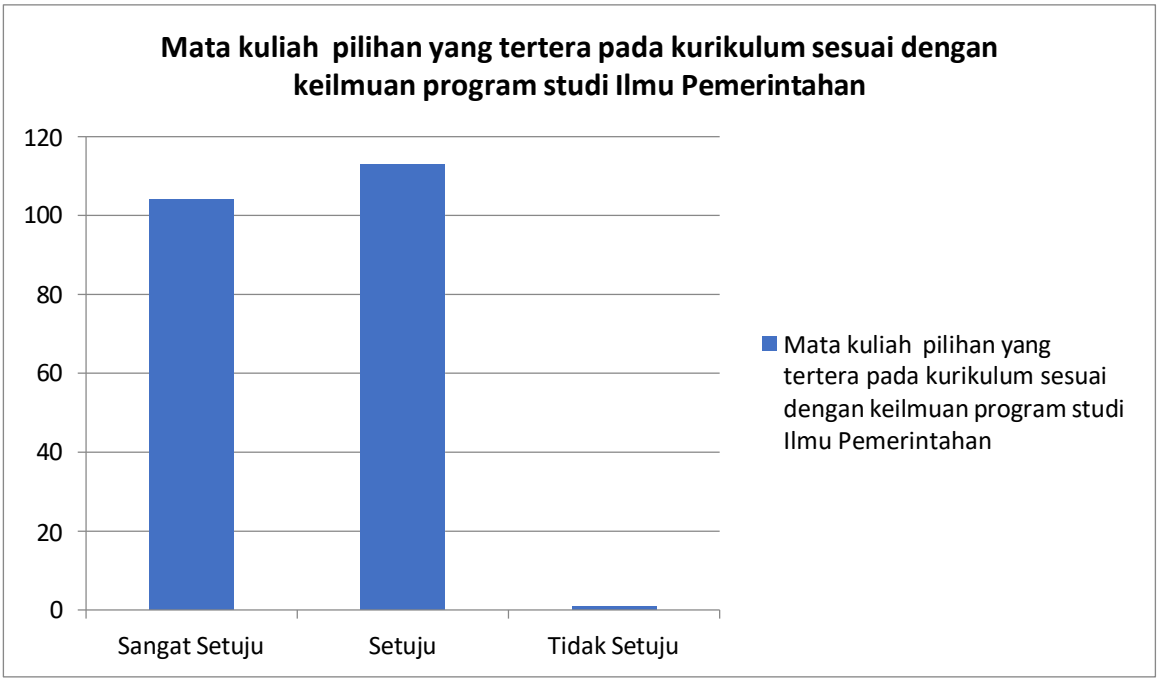
Hasil survei mengenai apakah mata kuliah dalam kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan mengacu pada pembelajaran terkait permasalahan dan studi kasus yang ada pada pemerintahan menunjukkan respons yang sangat positif. Dari total 218 responden, 106 orang menyatakan "sangat setuju" dan 111 orang "setuju," sementara hanya 1 responden yang "tidak setuju." Persentase yang signifikan ini menandakan bahwa kurikulum berhasil dalam mengintegrasikan studi kasus dan isu nyata yang relevan dengan konteks pemerintahan, sehingga mahasiswa merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan praktis di lapangan. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan perlunya institusi untuk terus mempertahankan pendekatan berbasis kasus dalam pengajaran, guna memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia pemerintahan yang dinamis.

6. Mata kuliah yang tertera pada kurikulum mengacu pada pembelajaran terkait permasalahan dan studi kasus yang ada pada pemerintahan



Hasil survei mengenai sejauh mana mata kuliah dalam kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan mengacu pada pembelajaran terkait permasalahan dan studi kasus yang ada pada pemerintahan menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari total 218 responden, 102 orang menyatakan "sangat setuju" dan 116 orang "setuju," mencerminkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa kurikulum telah berhasil mengintegrasikan materi yang relevan dengan isu-isu nyata dalam pemerintahan. Angka ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kasus yang diterapkan dalam pengajaran tidak hanya meningkatkan pemahaman teori, tetapi juga memberikan konteks praktis yang penting bagi mahasiswa, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan di lapangan.

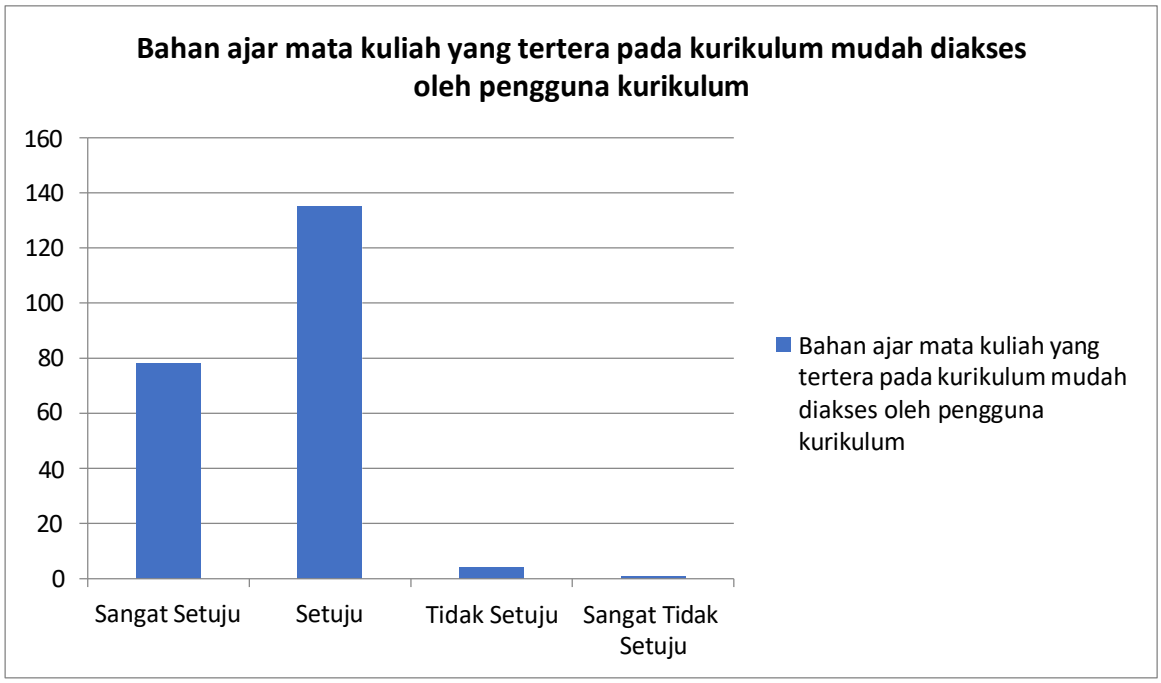
7. Mata kuliah pilihan yang tertera pada kurikulum sesuai dengan keilmuan program studi Ilmu Pemerintahan



Hasil survei mengenai kesesuaian mata kuliah pilihan dalam kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan dengan keilmuan yang diajarkan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari total 218 responden, 104 orang menyatakan "sangat setuju" dan 113 orang "setuju," sementara hanya 1 responden yang "tidak setuju." Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa bahwa mata kuliah pilihan yang ditawarkan relevan dan mendukung pengembangan kompetensi mereka dalam bidang pemerintahan.

8. Bahan ajar mata kuliah yang tertera pada kurikulum mudah diakses oleh pengguna kurikulum

(



Hasil survei mengenai aksesibilitas bahan ajar mata kuliah dalam kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan menunjukkan respons yang umumnya positif. Dari total 218 responden, 78 orang menyatakan "sangat setuju," 135 orang "setuju," sedangkan hanya 4 responden "tidak setuju" dan 1 responden "sangat tidak setuju." Angka ini mencerminkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa bahan ajar yang tersedia mudah diakses, yang berkontribusi pada pengalaman belajar yang lebih baik. Meskipun terdapat beberapa responden yang tidak puas, hasil ini menunjukkan bahwa kurikulum telah berhasil menyediakan materi yang memadai dan mudah dijangkau, sehingga mendukung proses pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, diharapkan terdapat pemantauan dan penyedian aksesibilitas bahan ajar agar semua mahasiswa dapat memanfaatkannya secara optimal.

5. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari hasil survei kepuasan implementasi kurikulum dalam program studi Ilmu Pemerintahan yang menunjukkan hasil positif, rencana kegiatan lanjutan akan difokuskan pada penguatan kualitas kurikulum melalui serangkaian forum diskusi dan workshop yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni. Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami aspek-aspek yang telah diakui baik serta mengidentifikasi area yang masih dapat ditingkatkan, termasuk penyampaian materi dan metode pengajaran. Selain itu, akan diadakan sesi umpan balik rutin untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan perkembangan terkini dalam pemerintahan dan kebutuhan pasar kerja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kurikulum dapat terus beradaptasi dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia profesional.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari Survei Kepuasan Implementasi Kurikulum oleh Pengguna Jasa dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan menunjukkan hasil yang tergolong positif. Mayoritas responden memberikan penilaian baik terhadap berbagai aspek kurikulum, termasuk relevansi materi, metodologi pengajaran, dan aksesibilitas bahan ajar. Hal ini mencerminkan komitmen program studi dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa serta dunia kerja. Meskipun hasilnya sudah baik, survei ini juga mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tetap relevan dan efektif, sehingga lulusan dapat menghadapi tantangan di bidang pemerintahan dengan lebih siap dan kompeten.